

## Literature Study of the Impact of Regional Financial Management, Accountability, and Transparency on Regional Government Financial Performance

Bela Putri Saqina Sipahutar<sup>1</sup>, Diba Ameilia Rahwani<sup>2</sup>, Dwi Fadhillah Apriliana Zebua<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [belaputrisaqinasipahutar@gmail.com](mailto:belaputrisaqinasipahutar@gmail.com); [dibaameilia150@gmail.com](mailto:dibaameilia150@gmail.com); [dwifadhillahzebua@gmail.com](mailto:dwifadhillahzebua@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, dan sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik, disertai dengan akuntabilitas yang jelas dan transparansi yang efektif, memberikan dampak signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal di tingkat pemerintah daerah.

**Keyword:** Keuangan; Daerah; Akuntabilitas; Kinerja; Transparansi

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the impact of regional financial management, accountability, and transparency on the financial performance of local governments. This study was conducted through a qualitative method with a literature study approach, where data was collected from various books, journals, and online sources. The results of the study indicate that good regional financial governance, accompanied by clear accountability and effective transparency, has a significant and positive impact on the financial performance of local governments. This finding emphasizes the importance of a comprehensive approach to achieving optimal financial performance at the local government level.*

**Keyword:** Finance; Region; Accountability; Performance; Transparency

### Corresponding Author:

Bela Putri Saqina Sipahutar,  
Universitas Negeri Medan,  
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia  
Email: [belaputrisaqinasipahutar@gmail.com](mailto:belaputrisaqinasipahutar@gmail.com)



## 1. INTRODUCTION

Manajemen pemerintahan yang efektif merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mewujudkan pembangunan negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya perhatian dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam pengelolaan ekonomi negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik untuk memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan terpercaya, sehingga diperlukan sistem informasi yang kredibel.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci suksesnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan daerah (Nasirwan, dkk, 2024). Laporan keuangan memainkan peran penting sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di berbagai sektor, seperti informasi keuangan. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan daerah harus dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, pemerintah harus memahami anggaran dan menghindari kesalahan informasi selama mengelola keuangan daerah (Wijaya & Sudiarta, 2020)

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan terhadap informasi akuntansi yang disajikan, maka diperlukan perbaikan dan penguatan dalam praktik tata kelola dan

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya prosedur pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan regulasi mengenai laporan keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku.

Meskipun penerapan berbagai aturan hukum terkait pemerintahan daerah telah dilakukan, hal tersebut belum dapat dijadikan indikator utama dalam mencapai tata kelola yang baik, terutama di sektor pengelolaan keuangan daerah dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan dan analisis mendalam mengenai praktik tata kelola keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan daerah untuk memastikan tersedianya informasi akuntansi yang tepat dan akurat guna mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah yang optimal.

Semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, harus dilakukan dengan baik. Dalam tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan target, kemudian menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk tata kelola keuangan yang baik, diperlukan peninjauan sistem akuntansi keuangan daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di daerah akurat dan memiliki tingkat.

Semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat dapat membantu memverifikasi transaksi-transaksi keuangan, sehingga dapat melacak penggunaan dana sesuai dengan tujuan peruntukannya, termasuk memeriksa otoritas, efisiensi, dan keabsahan dari pengeluaran dana tersebut.

Tata kelola keuangan daerah dalam praktiknya belum dapat dikatakan sempurna dan masih memiliki hambatan yang perlu diperbaiki. Hambatan ini terutama berkaitan dengan masalah akuntansi, yang pada kondisi tertentu dapat menjadi tantangan teknis bagi eksekutif dalam mengelola keuangan daerah. Misalnya, penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang saat ini diwajibkan dalam tata kelola keuangan negara, yang harus diimplementasikan secara efektif.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya manusia, insentif, dan sarana pendukung berperan penting dalam mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan peningkatan dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, serta penyediaan sumber daya yang memadai (Rahma & Zulkifli, 2018).

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah adalah dalam hal akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa para pengelola keuangan daerah di setiap organisasi perangkat daerah (DPO) harus melakukan tugas mereka secara teliti dan detail untuk mengatasi masalah akuntansi, serta untuk dapat memberikan informasi keuangan yang akurat. (Mardiasmo, 2004) menambahkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan di suatu lembaga hanya akan berjalan dengan baik jika ada sistem tata kelola yang efektif. Pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting, khususnya ketika dikelola dengan cara yang terpercaya oleh pemerintah. APBD juga memiliki keterkaitan erat dengan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti dana alokasi umum, yang pada akhirnya akan mempengaruhi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, belanja daerah juga menjadi bagian dari tata kelola APBD yang mencakup pertanggungjawaban, keterbukaan, dan tata kelola keuangan. Tata kelola yang baik dapat memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjelasannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi panduan atau arahan untuk mengelola keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan instrumen yang tepat untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah secara transparan, profesional, dan dapat dipercaya, guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi perhatian dan sorotan dari masyarakat, karena dinilai belum mencapai hasil yang optimal dan belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar pemerintah daerah dapat memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya, sebagai bagian dari konsep otonomi daerah yang telah diterapkan. Kinerja keuangan merupakan kapabilitas kerja yang terlihat dari hasil yang dicapai. Pemerintah dianggap memiliki kinerja keuangan yang optimal jika mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, tuntutan untuk kinerja keuangan yang baik tersebar di seluruh pemerintah daerah (Alrasid, 2022)

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Analisis teori dan keterkaitan antar variabel dilakukan melalui buku atau jurnal secara offline di perpustakaan dan secara online menggunakan platform seperti Mendeley, Google Scholar, dan media daring lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, kajian

pustaka perlu dilakukan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Ini berarti harus diimplementasikan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal penting dalam melakukan kajian kualitatif adalah sifat eksploratifnya (Laetitia et al., 2023).

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Tata Kelola Keuangan Daerah memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kinerja keuangan daerah. (Halim & Damayanti, 2007) menyebutkan bahwa tata kelola keuangan daerah mencakup semua aktivitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. (Hartati & Maria, 2018) menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah adalah bagian dari sistem tata kelola keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, tata kelola keuangan daerah menjadi komponen penting dalam sistem tata kelola keuangan negara dan berperan sebagai elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini meliputi tahapan-tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tata kelola keuangan yang efektif di level pemerintah daerah akan membantu memastikan kelancaran dan akuntabilitas proses-proses keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh.

Tata kelola keuangan daerah merupakan komponen penting dalam tata usaha keuangan daerah yang berperan vital dalam proses keuangan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk menjalankan tata kelola keuangan yang efektif, setiap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perlu merancang laporan sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan surat setor pajak, serta memastikan pembayaran belanja langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan sistematisa yang ditetapkan.

Pengawasan keuangan harus dilakukan sebagai bagian dari subsistem pengendalian internal yang ditujukan untuk menghindari tindakan penyimpangan yang berpotensi mengarah ke korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan ini juga bertindak sebagai mekanisme peringatan dini terhadap praktik yang mencurigakan dalam pengelolaan keuangan. Pembinaan dan pengembangan pengelola keuangan daerah perlu dilakukan secara terstruktur sejalan dengan perkembangan sistem tata kelola keuangan, terutama dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Tata kelola keuangan daerah yang baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kinerja keuangan daerah. Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Heluka et al., 2022), yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah cenderung akan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

(Zeny et al., 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk bertanggung jawab atas penyajian, pelaporan, dan pengungkapan berbagai aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah dan memiliki hak serta wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

(Sukimo, 2005) menyarankan agar pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pertanggungjawaban untuk memaksimalkan kinerja keuangan mereka. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah. (Fuad, 2013) menemukan bahwa pertanggungjawaban memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan, akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kegiatan dan keuangan daerah dikelola dengan baik. Oleh karena itu, langkah untuk meningkatkan akuntabilitas harus diutamakan untuk memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang memberikan jaminan akses kepada semua pihak yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, implementasi, serta hasil yang dicapai. Berdasarkan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), transparansi keuangan didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan jujur, dengan pemahaman bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakannya serta kepatuhan terhadap undang-undang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Krisnawati, 2021), transparansi merupakan suatu kewajiban bagi para pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi. Informasi yang disajikan harus akurat, rinci, dan sesuai dengan fakta untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa ada unsur yang disembunyikan atau keterlambatan dalam pengungkapannya.

Transparansi dalam menyampaikan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara adil dan bertanggung jawab.

(Fizarifah et al., 2019) menggambarkan Transparansi dapat dipandang sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka, yang bertujuan untuk pengawasan. Fokus utamanya adalah pada informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Transparansi ini mencakup dua aspek utama, yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Komunikasi publik mengharuskan adanya upaya aktif untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh dan menjangkau informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, transparansi menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan mendapatkan pengetahuan yang jelas terkait program dan rencana yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara hak masyarakat mengacu pada kemampuan mereka untuk mengakses informasi yang relevan dengan pelaksanaan pemerintahan.

Prinsip keterbukaan juga diatur Peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu wujud dari prinsip transparansi ini adalah penyajian laporan keuangan oleh pemerintah. Laporan keuangan tersebut dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas. (Mardiasmo, 2004) menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya.

Penerapan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, menciptakan pertanggungjawaban horizontal. Transparansi juga tercipta antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk menjadi lebih bersih, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berimbas pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada tingkat pencapaian di sektor keuangan daerah, termasuk perolehan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Analisis kinerja keuangan ini melibatkan penggunaan berbagai rasio keuangan yang dihasilkan dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang kemudian dihitung berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio-rasio ini membantu menilai dan mengukur pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Beberapa rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah: Mengukur sejauh mana daerah dapat menghasilkan pendapatan sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada dana pusat.
2. Rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah: Menilai seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.
3. Rasio aktivitas dan pertumbuhan: Melihat aktivitas ekonomi di daerah dan pertumbuhan yang dihasilkan.

Akuntabilitas keuangan daerah berarti kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. (Heluka et al., 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan informasi dan mengungkapkan kegiatan atau kinerja keuangan kepada pihak yang berhak mengetahuinya secara berkala.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Transparansi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan terkait pelaksanaan pemerintahan, dan akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya pemerintah yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan.

Selain akuntabilitas dan transparansi, pengawasan internal juga menjadi faktor penting dalam memastikan kinerja keuangan yang baik. Pengawasan internal membantu mendeteksi dan mencegah tindakan yang dapat merusak integritas keuangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kajian yang dilakukan oleh (Swandewi & Dewi, 2023) menunjukkan bahwa variabel tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko pada tahun 2020, melalui analisis regresi linear berganda, dapat dipertegas bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal secara simultan memiliki pengaruh yang cukup berarti bagi Ukuran capaian atau tingkat keberhasilan dalam bidang keuangan yang dimiliki oleh pemerintah di tingkat daerah.

Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perolehan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, serta keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator dan rasio keuangan yang relevan.

Dengan adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah dikelola dengan efektif dan efisien. Tata kelola keuangan daerah yang baik mencakup aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, akuntabilitas yang jelas, dan transparansi yang terbuka adalah faktor-faktor kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mencapai tujuan yang diinginkan.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah. Akuntabilitas juga memberikan dampak positif dan krusial pada kinerja keuangan daerah. Selain itu, transparansi terbukti berdampak positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah. Kombinasi dari tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabilitas yang kuat, dan transparansi yang efektif secara bersama-sama memiliki dampak signifikan dan krusial dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja keuangan daerah yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi.

#### REFERENCES

- Alrasid, S. (2022). Pengaruh Kapabilitas Relasi Terhadap Penciptaan Nilai dan Kinerja Pemasaran Dengan Kapabilitas Pemasaran Dinamis Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.7>
- Faud, M. R. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 10(4). Retrieved <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/380>
- Halim, A & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartaty, S., & Maria, M. (2018). Determinan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 82–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3840763>
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1(1), 40-53. <https://doi.org/10.51135/jba.v1.i1.p39-52>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7(2). <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v5i1.2572>
- Laetitia Boliina Kromen, M., A. Manafe, H., & Perseveranda, M., (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.1463>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nasirwan, N., Ginting, A. B., Manalu, C., & Sinaga, D. A. (2024). The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(3), 165–171. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v3i3.698>
- Rahmah, K., & Zulkifli, Z. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul: Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2), 113–130. <https://doi.org/10.32477/jkb.v26i2.104>
- Sukimo, S. (2005). Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Program Diploma Iii Wates Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/jpai.v4i2.858>
- Swandewi, K.D & Dewi, N.A.W.T (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI*. 14(4). <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>
- Vizarifah, N., Salatnaya, L. H. A., & Syarifah, S. (2019). Accountability Accounting as Achievement Measurement Tool for Profit Center Manager at UD. Meubel Mulya Jati Widang Tuban. *Academia Open*, 1(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.1.2019.492>
- Wijaya Santosa, I., & Sudiarta, G. (2020). MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN. *E-Jurnal Manajemen*, 9(3), 1049 - 1068. <https://doi:10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i03.p12>
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>